

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Aji, Indriyanto Seno. 2007. *Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta : CV. Aditya Media.
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*. Jakarta : Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Group.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.
- Enschede, Ch.J. 2002. *Beginselen van Sttrafrecht*. Deventer : Kluwer.
- Gunanegara. 2017. *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*. Jakarta : Tatanusa.
- Hagan, Frank. E. 2013. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hanitijo, Ronny. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Hiariej, Eddy. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Ilyas dan Yuyun Widianingsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Iskandar Syah, Mukadir. 2007. *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Jonkers, J.E. 1946. *Handboek Van Het Nederlansch-Indische Strafrecht*. Leiden : E.J.Brill.

- Klitgaard, Robert. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*. Terj. Masri Maris. Jakarta : YOI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. *Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik*. Jakarta : Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Parlindungan, A.P.I. 1983. *Aneka Hukum Agraria*. Bandung : Alumni.
- Raharjo, Budi. 2010. *Praktek Pelaksanaan tender Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengawasannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Surowidjojo, Adil. 2009. *Konvensi PBB, Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahannya*. Jakarta : Pelita Ilmu.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum : Suatu Pengantar* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suringa, Hazewinkel. 1953. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem : H.D Tjeenk Willink & Zoon N.V.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Minarno, Nur Basuki. 2011. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi Tindakan Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

- Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Noyon, T.J. 1947. *Het Wetboek van Strafrecht*. Arnhem : Uitgevers Het Huis De Grabbe.
- Van Apeldoorn, L.J.2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Pradnya Paramita.
- Van Bemmelen. 1953. *Arresten Over Strafrecht*. Arnhem : D.Brouwer En Zoon.
- Vos, H.B. 1950. *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*. Haarlem : H.D Tjeenk Willink & Zoon N.V.
- Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.

### **Jurnal Ilmiah**

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas *lex specialis derogat legi generali* dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 44 No. 4 (2015) h. 503-510.
- Armono, Yudhi Widyono. "Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Universitas Surakarta*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2014) h.5.
- Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* Vol. 4 No. 5 (Juli 2015) h.123.
- Djanggih, Hardianto. "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2017) h. 5.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono. "Metodologi Penelitian Hukum." *Fakultas Hukum UMS, Surakarta* (Januari 2016) h.6.
- El Mahdi, Haris dan Ratih Nur Pratiwi. "Implementasi Demokrasi dan Masalah Korupsi di Indonesia (Telah Kritis terhadap Perilaku Korupsi pada Masa Transisi Demokrasi)." *Interaktif* Vol. 4 No.2 (Februari 2012) h.2.
- Hartono, Made Sugi. "Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No.2, (Agustus 2016) h.219.
- Jauhani, Muhammad. "Tinjauan Medikolegal Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Kajian Kasus dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.BKL)", *Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia*, Vol. 3 No.1, (Februari 2021) h.271.
- Kartika, Tantri. "Politik Hukum Pembentukan Delik Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, (Desember 2018) h.138.
- Messah, Yunita A., Maria YY Asmat, and H. A. Rizal. "Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi Tentang Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi." *Jurnal Teknik Sipil* 2.1 (2013): h.11-22.

- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, (April 2014) h.74.
- Rahayu, Sri. "Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan", *Jurnal Inovatif Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 7 No. 3, (September, 2014) h.4.
- Rahim, Arhjayati. "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbe, Sipakainge' dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al Himayah*, Vol. 3 No. 1, (Maret 2019) h. 37.
- Ramadhaniyati, Yayuk. "Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas dan Independensi Satuan Pengawasan Internal dalam Mencegah Kecurangan di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri", *Jurnal of Auditing, Finance and Forensic Accounting*, Vol. 2 No. 2, (Oktober 2014) h. 101.
- Rohaedi, Edi. "Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Pakuan Law Review*, Vol. 5 No. 2. (Januari 2019) h. 200.
- Sacipto, R. "Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi." *Adil Indonesia Journal* Vol.1 No. 2 ( Januari 2019) h. 5.
- Saputra, Alvin. "Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, (Februari 2017) h.85.
- Sepud, I. Made. "Aspek Pidana dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah." *NOTARIAL Jurnal Kenotariatan* 1.1 (November 2016) h. 69-87.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi (2021) "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia," *Dharmasisya*: Vol. 1, Article 4.
- Suyatmiko, W. H. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020" *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

- Putra Eka, M.Sakti Tegar. 2018. "Kajian Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang. (Studi Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-PDG)". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

### **Peraturan Perundang-Undangan/Perjanjian Internasional**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 24 September 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang *Pencabutan Hak -Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya*. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 26 September 1961, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3675 Tahun 1999. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 16 Agustus 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 21 November 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tentang *Pengesahan United Nation Convetion Against Corruption (UNCAC)*. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 18 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 14 Januari 2012. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*.

### **Internet/Website**

Asian Development Bank Project Public Relations Activities and Support Of Government AntiCorruption Efforts Tool, tersedia di

<https://www.adb.org/documents/governance-and-anticorruption-project-design-office-general-counsel-guide>, diakses pada 9 September 2021.

Anonim. 2013. “Tiga Dosen UNM Didakwa Kasus Korupsi Pengadaan Alat Lab MIPA”, tersedia di: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2173183/tiga-dosen-unm-didakwa-kasus-korupsi-pengadaan-alat-lab-mipa>, diakses pada 8 September 2021.

Mursid, Fauziah dan Esthi Maharani. 2017. “KPK: 142 Kasus di KPK Berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa.”, tersedia di <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/27/o9fkjg335-kpk-142-kasus-di-kpk-berasal-dari-pengadaan-barang-dan-jasa>, diakses pada 9 September 2021.

Surya, I Made. 2016. “Koruptor Lahan FOK Undiksha Dihukum Satu Tahun”, tersedia di <https://bali.antaranews.com/berita/91806/koruptor-lahan-fok-undiksha-dihukum-satu-tahun>, diakses pada 8 Agustus 2020.

### **Kamus**

Chambers. 1983. *Black's Law Dictionary with Pronunciation*, St.Paul : Minn West Publishing co.

Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.



